DETERMINAN KETIMPANGAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA D-8: BUKTI EMPIRIS DARI FIXED EFFECT MODEL DAN PANEL ARDL

Mas Arif[1)], Sofyan Rizal[2)]
[1,2,3]Program Studi Magister Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan 15419, Indonesia
Email: [1]ibnshohibi@gmail.com
[2]sofyan.rizal@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing economic inequality in the D-8 countries during the 2014–2023 period, taking into account macroeconomic, institutional, financial, and Islamic banking access aspects. Independent variables include economic growth, education, infrastructure, government policy, corruption, globalization, gender, economic crises, climate change, and access to Islamic banking, while economic inequality measured using the P90/P100 rasio serves as the dependent variable. The study employs panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM) and Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approaches to analyze short-run and long-run relationships. The results of the descriptive analysis show high heterogeneity across countries and across variables. The FEM estimates indicate that only some variables have a significant effect on economic inequality, although the model is able to explain variations in inequality across D-8 countries. The ARDL estimates reveal differences in the effects of variables in the short and long term, indicating that economic inequality is a multidimensional and dynamic phenomenon. These findings underscore the importance of context-specific long-term policies and strengthening the role of Islamic banking in enhancing financial inclusion and equitable income distribution.

Keywords: *economic inequality; D-8; panel data; ARDL; Islamic banking.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8 selama periode 2014–2023, dengan mempertimbangkan aspek-aspek makroekonomi, kelembagaan, keuangan, dan akses terhadap perbankan syariah. Variabel-variabel independen meliputi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kebijakan pemerintah, korupsi, globalisasi, gender, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan akses terhadap perbankan syariah, sedangkan ketimpangan ekonomi yang diukur menggunakan rasio P90/P100 berfungsi sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Hasil analisis deskriptif menunjukkan heterogenitas yang tinggi antar negara dan antar variabel. Estimasi FEM menunjukkan bahwa hanya beberapa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, meskipun model tersebut mampu menjelaskan variasi ketimpangan di antara negara-negara D-8. Estimasi ARDL mengungkapkan perbedaan efek variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan fenomena multidimensi dan dinamis. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan jangka panjang yang disesuaikan dengan konteks serta penguatan peran perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan distribusi pendapatan yang adil.

Kata kunci: ketimpangan ekonomi; D-8; data panel; ARDL; perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan karena tidak hanya berkaitan dengan distribusi pendapatan, tetapi juga dengan kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, informasi, lapangan kerja, layanan publik, dan sumber daya ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat membatasi mobilitas sosial dan memperlebar kesenjangan kesempatan antar kelompok masyarakat. OECD (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di berbagai negara memandang distribusi pendapatan belum adil dan memiliki kekhawatiran terhadap rendahnya mobilitas sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak semata-mata merupakan persoalan

statistik, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial.

Persoalan tersebut relevan untuk dikaji pada negara-negara anggota *Developing Eight* (D-8), yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turkiye. Negara-negara tersebut memiliki karakteristik ekonomi, sosial, kelembagaan, dan tingkat perkembangan yang beragam. Meskipun memiliki potensi ekonomi dan populasi yang besar, negara-negara D-8 masih menghadapi persoalan distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi. Perbedaan tingkat pembangunan, kualitas tata kelola, akses pendidikan, infrastruktur, keterbukaan perdagangan, serta kondisi sosial dan lingkungan menyebabkan dinamika ketimpangan di setiap negara tidak selalu menunjukkan pola yang sama. Dengan demikian, ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8 perlu dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi.

Secara teoritis, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dapat dijelaskan melalui hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada tahap-tahap awal pembangunan dan kemudian menurun setelah tingkat pembangunan tertentu tercapai. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berlaku secara seragam karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, distribusi kesempatan, serta kualitas institusi. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pendidikan, infrastruktur, dan globalisasi dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap ketimpangan berdasarkan karakteristik negara dan periode penelitian. Bouincha dan Karim (2018), misalnya, menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berbeda menurut tingkat perkembangan negara. Sementara itu, penelitian mengenai perdagangan pada negara-negara D-8 menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh stabilitas politik dan daya saing ekonomi (Arisman et al., 2021).

Selain faktor ekonomi, kualitas institusi juga memiliki peranan penting. Pemerintahan yang efektif dan tingkat korupsi yang rendah dapat meningkatkan kualitas alokasi sumber daya publik sehingga manfaat pembangunan lebih luas dirasakan masyarakat. Sebaliknya, kelemahan tata kelola dan korupsi dapat menciptakan distorsi dalam distribusi sumber daya serta memperbesar kesenjangan. Gupta, Davoodi, dan Alonso-Terme menunjukkan bahwa korupsi dapat meningkatkan

ketimpangan melalui berkurangnya efektivitas program sosial, progresivitas perpajakan, dan pembentukan modal manusia. Dengan demikian, *government effectiveness* dan *control of corruption* menjadi faktor penting dalam menjelaskan variasi ketimpangan antarnegara.

Dimensi sosial juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketimpangan. Pendidikan meningkatkan kapasitas manusia dan peluang memperoleh pekerjaan yang lebih produktif, sedangkan kesetaraan gender memperluas partisipasi ekonomi kelompok perempuan. Ketimpangan dalam akses pendidikan dan kesempatan ekonomi berdasarkan gender dapat membatasi distribusi manfaat pembangunan. Mayer (2010) menunjukkan adanya hubungan erat antara ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa pendidikan, kondisi sosial ekonomi, globalisasi, dan gender merupakan faktor yang berkaitan dengan variasi ketimpangan pendapatan antarnegara. Oleh sebab itu, *secondary school enrollment* dan gender *parity index* relevan digunakan untuk menangkap dimensi sosial dalam determinasi ketimpangan ekonomi.

Perkembangan teknologi juga menciptakan dimensi baru dalam pemerataan kesempatan ekonomi. Akses terhadap internet dapat memperluas informasi, pendidikan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan keuangan. Namun, apabila perkembangan digital terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, teknologi juga berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, *internet users* menjadi salah satu faktor yang penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan ketimpangan ekonomi.

Faktor lingkungan juga semakin penting dalam pembahasan pembangunan yang berkeadilan. Dampak perubahan iklim cenderung lebih berat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena keterbatasan kemampuan mereka dalam melakukan adaptasi. Kelompok yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian dan sumber daya alam sangat rentan terhadap banjir, kekeringan, perubahan produktivitas, dan bencana lingkungan. Perspektif *doughnut economics* Raworth (2017) juga menekankan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia tanpa melampaui batas ekologis planet. Dengan demikian, aspek keberlanjutan lingkungan memiliki hubungan dengan kualitas kesejahteraan dan distribusi ekonomi. Dalam penelitian ini, *adjusted net savings* digunakan untuk merepresentasikan dimensi keberlanjutan pembangunan dan lingkungan.

Di samping berbagai faktor tersebut, akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam mengurangi kesenjangan kesempatan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan merupakan bagian penting dari terciptanya keadilan sosial. Al-Qur'an menekankan pentingnya agar kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok tertentu. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan keuangan syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran eksploitasi. Perbankan syariah secara teoritis dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan dan layanan keuangan, terutama apabila diarahkan kepada sektor produktif dan kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal.

Namun, keberadaan industri perbankan syariah tidak secara otomatis menjamin pemerataan akses keuangan. Penelitian Mohamad et al. (2020) mengenai negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam menunjukkan bahwa perbankan Islam dapat berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan, terutama melalui peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya digitalisasi, dan konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu dapat membatasi kemampuan perbankan syariah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap*: sebagian penelitian membahas perbankan syariah dan ketimpangan secara terpisah atau menggunakan cakupan negara yang lebih luas, sementara kajian yang secara khusus menguji aksesibilitas perbankan syariah bersama determinan ekonomi, sosial, kelembagaan, teknologi, gender, dan lingkungan pada negara-negara D-8 masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis determinan ketimpangan ekonomi di delapan negara anggota D-8 dengan mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, perdagangan, inflasi, efektivitas pemerintah, penggunaan internet, pengendalian korupsi, pendidikan, aksesibilitas perbankan syariah, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan tersebut memungkinkan ketimpangan dipahami secara lebih komprehensif, tidak hanya sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai hasil interaksi berbagai faktor struktural dan kelembagaan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bukti empiris dalam kajian ilmiah mengenai ketimpangan ekonomi di negara-negara

berkembang sekaligus memberikan implikasi kebijakan bagi negara-negara D-8 dalam membangun pertumbuhan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, teknologi, aksesibilitas perbankan syariah, gender, dan lingkungan terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel negara-negara anggota D-8 yang terdiri atas Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turkiye. Periode penelitian mencakup tahun 2014–2023 sehingga membentuk data panel yang terdiri atas 80 observasi. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber internasional sesuai dengan karakteristik masing-masing variabel.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi yang diproksikan dengan rasio P90/P100. Variabel independen meliputi GDP (X1), *trade* (X2), *inflation* (X3), *government effectiveness* (X4), *internet users* (X5), *control of corruption* (X6), *secondary school enrollment* (X7), *Islamic Banking Accessibility* (X8), *gender parity index* (X9), dan *adjusted net savings* (X10).

Analisis data dilakukan menggunakan EViews 13. Tahapan analisis meliputi pengujian karakteristik dan stasioneritas data panel, pengujian hubungan jangka panjang, serta estimasi model panel. Estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik data panel dan hubungan jangka pendek serta jangka panjang antar variabel. Pendekatan Panel ARDL dengan metode *Pooled Mean Group* (PMG) digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendek antar variabel.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1 : GDP berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.
H2 : *Trade* berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.
H3 : *Inflation* berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.
H4 : *Government Effectiveness* berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.
H5 : *Internet Users* berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-

negara D-8.

H6 : *Control of Corruption* berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.

H7 : *Secondary School Enrollment* berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.

H8 : *Islamic Banking Accessibility* berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.

H9 : *Gender Parity Index* berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.

H10 : *Adjusted Net Savings* berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.

KAJIAN PUSTAKA

Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan kondisi ketika distribusi pendapatan, kekayaan, kesempatan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya tidak tersebar secara merata di antara individu maupun kelompok masyarakat. Ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan, tetapi juga dapat tercermin dalam perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, informasi, infrastruktur, dan layanan keuangan. Dengan demikian, ketimpangan ekonomi merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan struktural suatu negara.

Dalam perspektif pembangunan, ketimpangan tidak selalu bergerak searah dengan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Kuznets menjelaskan bahwa hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan cenderung berbentuk U-terbalik. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan dapat meningkat karena proses transformasi struktural menyebabkan manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu. Setelah perekonomian mencapai tingkat perkembangan tertentu, peningkatan pendidikan, kesempatan kerja, industrialisasi, dan kebijakan redistribusi dapat mendorong penurunan ketimpangan. Penelitian Bouincha dan Karim menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan

ketimpangan berbeda menurut tingkat perkembangan negara, sehingga hubungan tersebut tidak bersifat universal.

Dalam penelitian ini, ketimpangan ekonomi diukur menggunakan rasio P90/P100, yaitu ukuran yang menggambarkan perbandingan bagian pendapatan kelompok pada persentil ke-90 dengan kelompok pada persentil ke-100. Penggunaan indikator tersebut diarahkan untuk menangkap konsentrasi pendapatan pada kelompok berpendapatan tinggi sebagai representasi ketimpangan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi suatu negara, yang umumnya ditunjukkan pada kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan apabila peningkatan aktivitas ekonomi menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor, wilayah, atau kelompok tertentu dapat meningkatkan ketimpangan.

Hipotesis Kuznets menjadi landasan utama dalam menjelaskan hubungan tersebut. Pada tahap awal pembangunan, proses industrialisasi dan transformasi struktural dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan karena manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata. Namun, ketika pembangunan berlanjut, peningkatan pendidikan, kesempatan kerja, dan kapasitas redistribusi pemerintah dapat mendorong pemerataan.

Dalam konteks negara-negara D-8, hubungan antara PDB dan ketimpangan menjadi penting karena negara-negara tersebut memiliki tingkat perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi yang berbeda. Penelitian terdahulu dalam tesis menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak selalu sama pada setiap negara. Oleh karena itu, penelitian ini menguji secara empiris pengaruh PDB terhadap ketimpangan ekonomi.

Perdagangan dan Ketimpangan Ekonomi

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen integrasi ekonomi yang dapat memperluas pasar, meningkatkan spesialisasi, mendorong investasi, dan meningkatkan produktivitas. Namun, manfaat perdagangan tidak selalu terdistribusi

secara merata. Sektor dan kelompok masyarakat yang memiliki modal, keterampilan, dan kapasitas produksi lebih tinggi dapat memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pasar.

Dalam perspektif globalisasi, keterbukaan perdagangan dapat memberikan efek positif maupun negatif terhadap ketimpangan. Peningkatan perdagangan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, tetapi pada saat yang sama dapat memperbesar kesenjangan apabila manfaat ekspor lebih banyak dinikmati oleh sektor tertentu atau kelompok pemilik modal.

Penelitian Arisman, Al Arif, dan Harahap mengenai negara-negara D-8 menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh stabilitas politik, daya saing ekspor, dan faktor pendukung lainnya. Dengan demikian, pengaruh perdagangan terhadap ketimpangan bergantung pada bagaimana keterbukaan ekonomi diterjemahkan menjadi kesempatan ekonomi yang dapat diakses secara luas.

Inflasi dan Ketimpangan Ekonomi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang mengakibatkan penurunan daya beli uang. Inflasi memiliki konsekuensi distribusional karena dampaknya tidak selalu sama bagi setiap kelompok pendapatan.

Kelompok berpendapatan rendah cenderung memiliki proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan pokok sehingga peningkatan harga pangan, energi, dan kebutuhan dasar dapat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap kesejahteraan mereka. Sebaliknya, kelompok berpendapatan tinggi umumnya memiliki aset dan instrumen keuangan yang lebih beragam sehingga memiliki kemampuan lebih besar untuk melindungi kekayaan dari tekanan inflasi.

Dalam konteks negara berkembang, inflasi yang tinggi juga dapat menurunkan daya beli, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, dan memperbesar kerentanan kelompok miskin. Penelitian Bodea et al. yang dibahas dalam tesis menunjukkan bahwa krisis mata uang, krisis perbankan, inflasi, dan utang dapat meningkatkan ketimpangan terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, inflasi menjadi salah satu dari beberapa faktor makroekonomi yang tepat dalam menjelaskan ketimpangan ekonomi.

Government Effectiveness dan Ketimpangan Ekonomi

Government Effectiveness menggambarkan kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kapasitas pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kualitas pemerintahan menjadi penting karena distribusi manfaat pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Teori kelembagaan menempatkan institusi sebagai faktor penting dalam menentukan kinerja ekonomi. Institusi yang efektif dapat menciptakan aturan yang lebih jelas, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah dapat menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien dan memperbesar kesenjangan kesempatan.

Dalam penelitian mengenai negara-negara D-8, hubungan antara pemerintah dan kinerja ekonomi juga menunjukkan bahwa pengaruh pemerintah tidak bersifat seragam antarnegara. Ahmad dan Ahmed menemukan bahwa hubungan ukuran pemerintah dan pendapatan per kapita di negara-negara D-8 berbeda menurut karakteristik negara. Dengan demikian, efektivitas pemerintah perlu dianalisis sebagai salah satu determinan kelembagaan ketimpangan.

Internet Users dan Ketimpangan Ekonomi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memperluas kesempatan ekonomi melalui peningkatan akses terhadap informasi, pendidikan, pekerjaan, pasar, dan layanan keuangan. Internet memungkinkan individu memperoleh informasi dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lokasi geografis.

Dari perspektif pembangunan manusia, peningkatan akses teknologi dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan ekonomi. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada pemerataan akses dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Apabila akses internet hanya terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan kelompok berpendapatan tinggi, perkembangan digital justru dapat menciptakan atau memperbesar *digital divide*.

Oleh karena itu, peningkatan jumlah pengguna internet dapat berpotensi mengurangi ketimpangan apabila akses teknologi disertai dengan peningkatan literasi

digital, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Sebaliknya, keterbatasan akses dan keterampilan digital dapat menyebabkan manfaat perkembangan teknologi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Pendidikan dan Ketimpangan Ekonomi

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi. Teori modal manusia menjelaskan bahwa investasi pendidikan dapat meningkatkan produktivitas individu dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Ketimpangan pendidikan dapat menghasilkan ketimpangan pendapatan karena individu yang memperoleh pendidikan dan keterampilan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pekerjaan produktif. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat membatasi mobilitas ekonomi kelompok berpendapatan rendah.

Penelitian Mayer menunjukkan adanya hubungan yang erat antara ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan variasi ketimpangan pendapatan, meskipun pengaruhnya juga berinteraksi dengan pengalaman kerja dan perbedaan regional. Oleh karena itu, *secondary school enrollment* digunakan dalam penelitian ini untuk merepresentasikan akses pendidikan pada tingkat menengah.

Control of Corruption dan Ketimpangan Ekonomi

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Dari perspektif kelembagaan, korupsi dapat mengurangi efektivitas kebijakan publik, meningkatkan biaya transaksi, mengurangi kualitas pelayanan pemerintah, dan menciptakan distorsi dalam distribusi sumber daya.

Korupsi juga memiliki konsekuensi distributif. Ketika sumber daya publik dialihkan melalui praktik korupsi, kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan jaringan ekonomi dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan kelompok miskin kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan publik secara optimal.

Gupta, Davoodi, dan Alonso-Terme dalam penelitian yang dikaji dalam tesis menemukan bahwa korupsi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan melalui penurunan progresivitas pajak, efektivitas program sosial, dan kualitas pembentukan modal manusia. Korupsi juga dapat memperburuk kemiskinan melalui hambatan terhadap pertumbuhan dan pendapatan kelompok miskin. Dengan demikian, semakin efektif pengendalian korupsi, semakin besar peluang terciptanya distribusi sumber daya yang lebih adil.

Islamic Banking Accessibility dan Ketimpangan Ekonomi

Perbankan syariah merupakan salah satu institusi dalam sistem keuangan Islam yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, antara lain keadilan, kemaslahatan, pembagian risiko, larangan riba, dan penghindaran eksploitasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan merupakan bagian penting dari terciptanya keadilan sosial.

Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar normatif bagi pengembangan instrumen ekonomi Islam yang diarahkan pada terciptanya distribusi ekonomi yang lebih adil. Dalam tesis, prinsip distribusi tersebut dikaitkan antara lain dengan QS. Al-Hasyr ayat 7 dan beberapa ayat lainnya yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan kepedulian sosial.

Secara ekonomi, perbankan syariah dapat berkontribusi terhadap pemerataan melalui penyediaan akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi masyarakat. Aksesibilitas keuangan tidak hanya berarti keberadaan lembaga keuangan, tetapi juga mencakup ketersediaan infrastruktur, kemudahan akses, keterjangkauan layanan, dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan produk keuangan.

Namun, keberadaan perbankan syariah tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan. Tesis menunjukkan adanya sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya digitalisasi, dan belum optimalnya orientasi pembiayaan ke sektor produktif. Kondisi tersebut dapat menyebabkan layanan perbankan syariah lebih banyak dinikmati oleh masyarakat perkotaan atau kelompok berpendapatan menengah dan tinggi.

Penelitian Mohamad et al. mengenai negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam menunjukkan bahwa perbankan Islam dapat berkontribusi terhadap

pengurangan ketimpangan melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Pengaruh tersebut menjadi lebih kuat ketika aktivitas sosial perbankan Islam ditingkatkan. Berdasarkan perspektif tersebut, peningkatan aksesibilitas perbankan syariah secara teoritis diharapkan dapat memperluas kesempatan ekonomi dan berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan.

Gender Parity dan Ketimpangan Ekonomi

Kesetaraan gender merupakan bagian dari pembangunan manusia karena memberikan kesempatan yang relatif setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi. Ketidaksetaraan gender dapat membatasi kapasitas ekonomi suatu negara karena sebagian sumber daya manusia tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas ekonomi.

Peningkatan kesetaraan gender dapat memperluas partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pasar kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperbesar kapasitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, hambatan terhadap pendidikan dan pekerjaan perempuan dapat memperkuat ketimpangan kesempatan dan pendapatan.

Dalam tesis, penelitian Derris et al. menunjukkan hubungan partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan kajian IMF menekankan bahwa kesetaraan gender dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, *Gender Parity Index* digunakan untuk menangkap dimensi kesetaraan gender dalam penelitian ini.

Adjusted Net Savings dan Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan *output* saat ini, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara mempertahankan modal ekonomi, manusia, dan lingkungan untuk generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan keberlanjutan sumber daya sebagai bagian penting dari kesejahteraan ekonomi.

Raworth melalui konsep *Doughnut Economics* menjelaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia sekaligus

menjaga batas ekologis planet. Ruang pembangunan yang ideal berada di antara batas sosial minimum dan batas ekologis maksimum. Dengan demikian, pembangunan yang mengabaikan lingkungan berpotensi menghasilkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar pada kelompok rentan.

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan dapat meningkatkan ketimpangan karena kelompok berpendapatan rendah cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih terbatas. Mereka juga lebih bergantung pada sektor-sektor yang sensitif terhadap kondisi lingkungan, seperti pertanian dan perikanan. Guivarch et al. menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim cenderung membebani kelompok miskin secara tidak proporsional.

Dalam penelitian ini, *Adjusted Net Savings* (ANS) digunakan untuk merepresentasikan dimensi keberlanjutan pembangunan. Variabel tersebut memungkinkan analisis ketimpangan tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga dari keberlanjutan modal dan sumber daya yang menopang kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Teoretis Determinasi Ketimpangan Ekonomi

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, ketimpangan ekonomi merupakan hasil interaksi berbagai faktor. GDP merepresentasikan kapasitas dan perkembangan ekonomi; *trade* menggambarkan keterbukaan ekonomi; *inflation* merepresentasikan stabilitas harga; *government effectiveness* dan *control of corruption* merepresentasikan kualitas kelembagaan; internet users merepresentasikan akses teknologi; *secondary school enrollment* merepresentasikan modal manusia; *Islamic Banking Accessibility* merepresentasikan akses terhadap layanan keuangan syariah; *gender parity* merepresentasikan pemerataan kesempatan berdasarkan gender; sedangkan *adjusted net savings* merepresentasikan dimensi keberlanjutan pembangunan.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan ketimpangan ekonomi sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, teknologi, keuangan syariah, gender, dan lingkungan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam tesis, yaitu masih terbatasnya penelitian yang menguji faktor ekonomi dan non-ekonomi secara simultan pada

negara-negara D-8 sekaligus memberikan perhatian khusus terhadap aksesibilitas perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu ketimpangan ekonomi di negara-negara anggota D-8 yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki selama kurun waktu 2014 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk panel seimbang yang menggabungkan dimensi *cross-sectional* dari delapan negara tersebut dengan dimensi *time-series* dalam sepuluh tahun, sehingga menghasilkan 80 observasi. Data diperoleh dari berbagai sumber internasional, yaitu *World Development Indicators* (Bank Dunia), *World Inequality Database* (WID), *UNESCO Institute for Statistics* (UIS), *Worldwide Governance Indicators* (WGI), *Islamic Financial Services Board* (IFSB), dan *Transparency International.*

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi, yang diproksikan dengan rasio P90/P100. Variabel-variabel bebas terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PDB), globalisasi yang diukur berdasarkan keterbukaan perdagangan, krisis ekonomi yang diproksikan oleh tingkat inflasi, efektivitas pemerintahan, kualitas infrastruktur digital yang diproksikan oleh persentase pengguna internet, pengendalian korupsi, tingkat pendidikan yang diproksikan oleh tingkat partisipasi sekolah menengah; akses ke perbankan syariah; kesetaraan gender, yang diproksikan oleh Indeks Kesetaraan Gender (GPI); dan perubahan iklim, yang diproksikan oleh Tabungan Bersih yang Disesuaikan Termasuk Kerusakan Akibat Emisi Partikulat.

Analisis dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, regresi data panel digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel terhadap ketimpangan ekonomi. Pemilihan model dimulai dengan uji spesifikasi menggunakan uji Chow untuk menentukan model terbaik antara Model Efek Bersama dan Model Efek Tetap.

Berdasarkan hasil uji Chow, Model Efek Tetap (FEM) dipilih sebagai model estimasi utama. Sebelum estimasi dilakukan, model diuji terhadap multikolinearitas menggunakan Faktor Inflasi Varians (VIF) dan terhadap heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser untuk memastikan validitas model.

Kedua, penelitian ini menerapkan model panel *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dengan pendekatan *Pooled Mean Group* (PMG) untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang di antara variabel-variabel tersebut. Sebelum estimasi ARDL dilakukan, data diuji stasioneritasnya menggunakan uji akar unit panel, dilanjutkan dengan uji kointegrasi untuk memastikan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang di antara variabel-variabel tersebut. Model ARDL dipilih karena dapat mengakomodasi karakteristik data panel dengan urutan integrasi campuran yaitu, I(0) dan I(1) tanpa mengharuskan semua variabel memiliki urutan integrasi yang sama.

Seluruh pemrosesan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 13. Tingkat signifikansi statistik ditetapkan pada 5%, sehingga suatu variabel dianggap memiliki pengaruh yang signifikan jika nilai p-nya kurang dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data panel seimbang yang mencakup delapan negara anggota D-8 yaitu, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki untuk periode 2014–2023. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan Model Efek Tetap (FEM) untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor yang menentukan ketimpangan ekonomi, dilanjutkan dengan model *Panel Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) menggunakan pendekatan *Pooled Mean Group* (PMG) untuk menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, pemilihan model, pengujian asumsi klasik, estimasi FEM, uji stasioneritas, uji kointegrasi, dan estimasi Panel ARDL.

1) Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan tingkat heterogenitas yang tinggi pada seluruh variabel penelitian. Variasi ini mencerminkan perbedaan karakteristik ekonomi, kelembagaan, sosial, dan keuangan di antara negara-negara anggota D-8. Perbedaan dalam tingkat pembangunan, kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan perkembangan sektor keuangan syariah mengakibatkan distribusi data yang relatif beragam. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa negara-negara D-8 tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok yang homogen; oleh karena itu, penggunaan model data panel lebih tepat daripada pendekatan regresi biasa. Hasil-hasil ini juga memberikan indikasi awal bahwa variasi ketimpangan ekonomi di

seluruh negara-negara D-8 dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor struktural yang berbeda dari satu negara ke negara lain.

2) Pemilihan Model Regresi Panel

Langkah selanjutnya adalah menentukan model regresi panel yang paling tepat dengan menggunakan Uji Efek Tetap Redundan (Uji Chow).

Tabel 1 Hasil Uji Chow (Redundant Fixed Effect Test)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.773365	(7,62)	0
Cross-section Chi-square	78.505148	7	0

Sumber: Output EViews, diolah oleh peneliti

Hasil uji menunjukkan bahwa Model Efek Tetap (FEM) lebih tepat daripada Model Efek Bersama; oleh karena itu, estimasi selanjutnya menggunakan pendekatan FEM. Penggunaan model ini didasarkan pada adanya perbedaan karakteristik antarnegara yang dapat memengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi, sehingga heterogenitas individual masing-masing negara perlu diperhitungkan dalam proses estimasi.

3) Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum estimasi, model diuji untuk memastikan bahwa asumsi dasar regresi terpenuhi. Uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa, secara umum, hubungan antar variabel independen tetap pada tingkat yang dapat diterima dan karenanya tidak menimbulkan gangguan serius terhadap estimasi model.

Variable	Centered VIF
C	NA

Tabel 2 Uji Variance Inflation Factors

X1	2.390329
X2	7.376291
X3	2.165623
X4	16.53667
X5	4.515694
X6	15.68627
X7	5.294345
X8	3.002549
X9	11.89021
X10	1.489792

Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser dilakukan untuk mengevaluasi stabilitas varians residual.

Tabel 3 Hasil Uji Glejser

Variable	Prob.
C	0.0063
X1	0.8312
X2	0.2803
X3	0.3514
X4	0.3148
X5	0.0838
X6	0.4591
X7	0.8286
X8	0.1988
X9	0.6711
X10	0.1612

Berdasarkan hasil uji ini, model FEM dianggap cocok untuk digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel independen dan ketimpangan ekonomi.

4) Hasil Estimasi Model Efek Tetap (FEM)

Estimasi menggunakan Model Efek Tetap menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, model tersebut mampu menjelaskan variasi ketimpangan ekonomi di antara negara-negara D-8 dengan baik.

Tabel 4 Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Metode Fixed Effect (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.545506	0.551113	-0.989826	0.3552
X1	-0.001456	0.020026	-0.072697	0.9441
X2	0.000516	0.011301	0.045647	0.9649
X3	0.007105	0.005654	1.256667	0.2492
X4	-0.008463	0.01991	-0.42505	0.6836
X5	0.009392	0.016465	0.570419	0.5862
X6	-0.013292	0.02331	-0.570215	0.5864
X7	0.002353	0.029044	0.08101	0.9377
X8	-0.008873	0.005895	-1.505205	0.176
X9	-0.018339	0.03612	-0.507726	0.6272
X10	0.000397	0.000215	1.847914	0.1071
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.924909	Mean dependent var		-0.502449
Adjusted R-squared	0.90432	S.D. dependent var		0.034237
S.E. of regression	0.01059	Akaike info criterion		-6.062649
Sum squared resid	0.006954	Schwarz criterion		-5.526693
Log likelihood	260.5059	Hannan-Quinn criter.		-5.847769
F-statistic	44.92146	Durbin-Watson stat		1.332161
Prob(F-statistic)	0			

Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel makroekonomi, kelembagaan, sosial, lingkungan, dan aksesibilitas perbankan syariah sangat efektif dalam menjelaskan perubahan ketimpangan ekonomi selama periode pengamatan. Namun, ketika dianalisis secara individual, tidak semua variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap

penentu memiliki karakteristik pengaruh yang berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi dan kelembagaan masing-masing negara.

5) Analisis Panel ARDL

Untuk melengkapi analisis statis menggunakan FEM, penelitian ini menggunakan model panel *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* dengan pendekatan *Pooled Mean Group (PMG).* Sebelum estimasi, data diuji menggunakan uji akar unit, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel penelitian terdiri dari kombinasi variabel yang terintegrasi pada orde I(0) dan I(1), sehingga memenuhi persyaratan untuk menggunakan model ARDL. Selain itu, uji kointegrasi Kao menghasilkan nilai ADF sebesar −2,922866 dengan probabilitas 0,0017 (<0,05), yang menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang di antara variabel-variabel dalam model.

Berdasarkan kriteria informasi Akaike (*Akaike Information Criterion* atau AIC), diperoleh spesifikasi model terbaik, yaitu PMG(1,0,1,0,0). Dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah observasi, kompleksitas model, dan relevansi teoretis, estimasi ARDL dilakukan dengan menggunakan empat variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi (X1), infrastruktur digital (X5), akses terhadap perbankan syariah (X8), dan perubahan iklim (X10). Keempat variabel tersebut merepresentasikan dimensi makroekonomi, transformasi digital, inklusi keuangan syariah, dan lingkungan. Pembatasan jumlah variabel ini bertujuan mengurangi risiko *overparameterization*, sehingga model yang dihasilkan lebih parsimonious dan relatif lebih mudah diinterpretasikan.

Tabel 5 Hasil Estimasi Model Panel ARDL
dengan Pendekatan *Pooled Mean Group* (PMG)

Dependent Variable: D(Y)
Method: ARDL
Date: 12/02/25 Time: 21:10
Sample: 2015 2023
Included observations: 72
Number of cross-sections: 8
Dependent lags: 1 (Automatic)
Automatic-lag linear regressors (1 max. lags): X1 X5 X8 X10
Deterministics: No constant and no trend (Case 1)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Number of models evaluated: 16
Selected model: PMG(1,0,1,0,0)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Long-run (Pooled) Coefficients				
X1	-0.017594	0.000619	-28.42636	0
X5	-0.007654	0.003765	-2.033048	0.046
X8	0.008175	0.000826	9.894185	0
X10	0.000452	0.000108	4.167656	0.0001
Short-run (Mean-Group) Coefficients				
COINTEQ	-0.372365	0.255373	-1.458119	0.1493
D(X5)	-0.065123	0.03048	-2.136565	0.0361
Log-Likelihood:	309.7489			

Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa semua variabel yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi (β = −0,017594; P < 0,01) dan infrastruktur digital (β = −0,007654; P < 0,05) memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, akses ke perbankan syariah (β = 0,008175; P < 0,01) dan perubahan iklim (β = 0,000452; P < 0,01) memiliki pengaruh positif. Dalam jangka pendek, *Error Correction Term (ECT)* memiliki nilai negatif (−0,372365) tetapi tidak signifikan (P = 0,1493), sementara hanya perubahan dalam infrastruktur digital yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan ketimpangan ekonomi dalam jangka pendek.

A. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi

Hasil estimasi Model Efek Tetap (FEM) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8 selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu disertai dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebaliknya, hasil estimasi Panel ARDL menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan setelah melalui proses penyesuaian jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesetaraan pendapatan tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu agar manfaat pembangunan dapat tersebar melalui peningkatan peluang kerja, investasi, dan produktivitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis Kuznets, yang menyatakan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada tahap-tahap awal pembangunan, namun akan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pembangunan ekonomi. Temuan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada penurunan ketimpangan apabila disertai dengan pembangunan yang inklusif. Sebaliknya, hasil analisis FEM menunjukkan bahwa hubungan ini belum terlihat secara jelas dalam jangka pendek akibat perbedaan karakteristik ekonomi di antara negara-negara D-8.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah negara-negara D-8 tidak hanya harus berfokus pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan modal manusia, dan distribusi investasi yang merata di seluruh wilayah.

B. Dampak Globalisasi terhadap Ketimpangan Ekonomi

Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas perdagangan internasional belum secara langsung memengaruhi distribusi pendapatan di negara-negara D-8. Hal ini

mungkin disebabkan karena manfaat perdagangan internasional terutama dinikmati oleh sektor-sektor yang sangat kompetitif, sementara kelompok berpenghasilan rendah belum mampu memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ditawarkan oleh globalisasi.

Secara teoretis, globalisasi dapat menimbulkan dua konsekuensi yang berbeda. Di satu sisi, keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas pasar, dan mendorong investasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, globalisasi juga dapat memperlebar kesenjangan jika manfaat perdagangan terkonsentrasi semata-mata pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki modal lebih besar, teknologi, dan sumber daya manusia berkualitas lebih tinggi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dampak globalisasi terhadap ketimpangan sangat bergantung pada kualitas kelembagaan, tingkat pendidikan, dan struktur ekonomi masing-masing negara. Oleh karena itu, manfaat globalisasi di negara-negara D-8 perlu diimbangi dengan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, memperkuat usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga manfaat perdagangan dapat dinikmati secara lebih merata.

C. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi

Variabel krisis ekonomi, yang diwakili oleh tingkat inflasi, tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi berdasarkan hasil estimasi FEM. Hasil ini menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi selama periode penelitian bukanlah faktor utama yang menentukan perubahan ketimpangan pendapatan di negara-negara D-8.

Meskipun demikian, secara teoretis, Tingkat inflasi yang tinggi berpotensi melemahkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang mengalokasikan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, stabilitas harga tetap menjadi prasyarat penting untuk memastikan distribusi kesejahteraan sosial yang merata.

Kurangnya dampak signifikan dari inflasi kemungkinan disebabkan oleh kemampuan masing-masing negara dalam menerapkan kebijakan moneter dan

fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi selama periode penelitian. Selain itu, karakteristik inflasi di setiap negara D-8 berbeda-beda, sehingga dampaknya terhadap ketimpangan tidak seragam.

D. Dampak Efektivitas Pemerintahan terhadap Ketimpangan Ekonomi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas tata kelola belum secara langsung memperbaiki distribusi pendapatan.

Secara teoretis, pemerintah yang efektif seharusnya mampu meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan. Namun, dibutuhkan waktu agar seluruh penduduk dapat merasakan manfaat tersebut. Selain itu, efektivitas pemerintah tidak selalu disertai dengan akses yang merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau layanan ekonomi, sehingga dampaknya terhadap ketimpangan masih relatif terbatas.

E. Dampak Infrastruktur (Digital) terhadap Ketimpangan Ekonomi

Infrastruktur digital, yang diwakili oleh persentase pengguna internet, menunjukkan hasil yang berbeda antara estimasi panel FEM dan ARDL. Dalam estimasi FEM, dampak infrastruktur digital terhadap ketimpangan ekonomi tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya, estimasi panel ARDL menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang, infrastruktur digital memiliki efek negatif dan signifikan secara statistik terhadap ketimpangan ekonomi ($P < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan akses internet dapat mendorong penurunan ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang.

Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat transformasi digital tidak langsung terwujud, melainkan memerlukan waktu agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara penuh. Peningkatan akses internet membuka peluang yang lebih luas dalam bidang pendidikan, informasi, perdagangan digital, dan layanan keuangan, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperluas peluang untuk menghasilkan pendapatan.

Hasil dari studi ini selaras dengan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi bisa meningkatkan inklusi ekonomi dengan

memperluas akses informasi dan mengurangi biaya transaksi. Namun, manfaat ini sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, tingkat literasi digital, dan pemerataan cakupan internet. Jika akses internet hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, kesenjangan digital justru bisa memperlebar ketidaksetaraan.

Oleh karena itu, pemerintah negara-negara D-8 perlu memperluas pembangunan infrastruktur digital ke daerah-daerah yang kurang berkembang, sekaligus meningkatkan literasi digital agar manfaat transformasi digital bisa dirasakan secara lebih merata.

F. Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap Ketimpangan Ekonomi

Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa pengendalian korupsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas pemerintahan melalui pengendalian korupsi belum bisa secara langsung mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara D-8. Secara teori, korupsi bisa meningkatkan ketimpangan karena mengurangi efektivitas pengeluaran publik, menaikkan biaya ekonomi, dan membatasi akses masyarakat miskin ke layanan publik. Namun, dampak pengendalian korupsi terhadap distribusi pendapatan umumnya bersifat jangka panjang, sehingga sulit untuk diamati dalam periode penelitian yang relatif singkat.

Selain itu, efektivitas kebijakan anti-korupsi berbeda di setiap negara D-8, baik dari sisi penegakan hukum maupun kualitas lembaganya. Perbedaan ini membuat dampak pengendalian korupsi terhadap ketimpangan menjadi tidak merata, sehingga hubungan statistiknya tidak signifikan.

Artinya, reformasi tata kelola harus dikombinasikan dengan kebijakan redistribusi pendapatan, peningkatan kualitas layanan publik, dan perlindungan sosial supaya manfaat pengendalian korupsi bisa dirasakan lebih luas.

G. Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Ekonomi

Variabel pendidikan, yang diukur menggunakan tingkat partisipasi sekolah menengah, tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi berdasarkan hasil estimasi FEM. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan akses pendidikan tidak otomatis membawa kesetaraan pendapatan.

Secara teori, pendidikan adalah investasi pada sumber daya manusia yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatkan pendapatan orang. Namun, manfaat pendidikan terhadap distribusi pendapatan umumnya baru terlihat dalam jangka panjang setelah lulusan masuk ke dunia kerja.

Selain itu, kualitas pendidikan di negara-negara D-8 masih relatif beragam. Peningkatan angka partisipasi sekolah belum tentu diikuti dengan perbaikan kualitas pengajaran atau kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Situasi ini berarti dampak pendidikan terhadap ketimpangan ekonomi belum terasa signifikan.

Oleh karena itu, meningkatkan akses pendidikan perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguatan keterampilan digital agar bisa menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompetitif.

H. Dampak Aksesibilitas Perbankan Syariah terhadap Ketimpangan Ekonomi

Aksesibilitas terhadap perbankan syariah adalah salah satu variabel utama dalam penelitian ini. Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa aksesibilitas perbankan syariah belum memberikan dampak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Namun, hasil estimasi Panel ARDL menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi ($P<0,01$).

Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh perbankan syariah terhadap distribusi pendapatan membutuhkan waktu untuk berkembang melalui peningkatan inklusi keuangan, pembiayaan sektor produktif, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karakteristik pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil *(profit and loss sharing)* memiliki potensi untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan memperoleh layanan keuangan formal.

Namun, jika perkembangan industri perbankan syariah lebih terkonsentrasi di area tertentu atau di kalangan kelompok orang tertentu, manfaatnya untuk pemerataan pendapatan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, memperluas jaringan layanan, berinovasi dengan produk keuangan syariah, dan meningkatkan literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.

Temuan ini menegaskan pandangan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mendukung pemerataan kekayaan jika didukung oleh kebijakan yang tepat.

I. Dampak Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan Ekonomi

Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa kesetaraan gender, yang diwakili menggunakan *Gender Parity Index* (GPI), belum memberikan dampak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatkan akses pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan belum secara langsung mampu memperbaiki distribusi pendapatan.

Hal ini bisa disebabkan oleh kesenjangan yang masih terjadi di pasar kerja, termasuk perbedaan peluang kerja, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, dan kesenjangan upah. Oleh karena itu, meningkatkan kesetaraan pendidikan perlu diikuti dengan kebijakan yang mendorong partisipasi ekonomi perempuan agar manfaatnya bagi distribusi pendapatan bisa lebih optimal.

J. Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketimpangan Ekonomi

Perubahan iklim yang diukur menggunakan *Adjusted Net Savings Including Particulate Emission Damage,* menunjukkan hasil yang signifikan dalam estimasi jangka panjang ARDL Panel (P<0,01). Temuan ini menunjukkan bahwa degradasi lingkungan disertai dengan meningkatnya efek perubahan iklim bisa memperlebar ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8. Komunitas berpenghasilan rendah umumnya lebih rentan terhadap bencana alam, penurunan produktivitas pertanian, dan kerusakan lingkungan karena kemampuan adaptasi mereka lebih terbatas. Akibatnya, dampak ekonomi dari perubahan iklim sebagian besar ditanggung oleh kelompok yang rentan, yang semakin memperbesar kesenjangan pendapatan.

Temuan ini sejalan dengan literatur pembangunan berkelanjutan, yang menyatakan bahwa perubahan iklim adalah salah satu faktor struktural yang bisa memperparah ketimpangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan adaptasi dan mitigasi yang efektif.

Implikasi kebijakannya adalah pemerintah di negara-negara D-8 perlu mengintegrasikan langkah dan kebijakan lingkungan dengan strategi pembangunan

ekonomi melalui investasi hijau, memperkuat ketahanan sektor pertanian, serta perluasan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap risiko perubahan iklim.

K. Diskusi Hasil Panel ARDL

Model Panel *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* digunakan untuk melengkapi hasil estimasi Model Efek Tetap (FEM) dengan menganalisis hubungan dinamis antar variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berbeda dengan FEM yang hanya menggambarkan hubungan statis, model ARDL dapat mengidentifikasi proses penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ada hubungan jangka panjang antara variabel penelitian, yang dibuktikan dengan hasil uji kointegrasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi jangka pendek, ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8 akan bergerak menuju keseimbangan jangka panjang bersamaan dengan faktor-faktornya. Jadi, perubahan variabel makroekonomi, institusi, atau keuangan tidak selalu langsung berdampak pada ketimpangan, tetapi membutuhkan waktu agar efeknya benar-benar tercermin dalam distribusi pendapatan.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur digital berkontribusi mengurangi ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, akses ke perbankan syariah dan perubahan iklim menunjukkan hubungan positif dengan ketimpangan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki mekanisme transmisi yang berbeda, jadi efektivitas kebijakan juga memerlukan pendekatan yang berbeda.

Sementara itu, koefisien *Error Correction Term (ECT)* negatif, menandakan arah penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Namun, koefisien ini belum signifikan secara statistik, sehingga proses penyesuaian menuju keseimbangan relatif lambat. Situasi ini mencerminkan bahwa perubahan distribusi pendapatan di negara-negara D-8 dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menunjukkan dampak sebenarnya.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di negara anggota D-8 adalah fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, kelembagaan, sosial, lingkungan, dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi dan penguatan infrastruktur digital ikut berperan dalam mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata jika terus berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan sektor keuangan syariah dan perubahan iklim menunjukkan bahwa manfaat pembangunan tidak otomatis akan menghasilkan kesetaraan jika tidak diiringi dengan akses yang lebih luas, inklusi keuangan yang lebih baik, dan kebijakan pembangunan yang adil. Temuan ini menunjukkan bahwa mengurangi ketimpangan ekonomi tidak bisa dicapai hanya dengan satu kebijakan, tapi membutuhkan sinergi antara pembangunan ekonomi, penguatan kelembagaan, transformasi digital, perluasan layanan keuangan syariah, dan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model empiris yang mengintegrasikan faktor makroekonomi, kelembagaan, sosial, lingkungan, dan akses ke perbankan syariah dalam analisis ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8, memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan studi yang hanya fokus pada faktor ekonomi konvensional.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah negara-negara D-8 perlu mengarahkan kebijakan pembangunan mereka menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memastikan akses yang setara ke pendidikan, infrastruktur digital, dan layanan keuangan, termasuk perbankan syariah. Untuk kemajuan pengetahuan, studi ini memperkaya penelitian tentang faktor-faktor ketimpangan ekonomi dengan memasukkan dimensi keuangan Islam dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka analisis. Dari perspektif ekonomi dan sosial, temuan ini bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung kelompok rentan dengan meningkatkan akses ke pembiayaan, teknologi, dan peluang ekonomi. Di samping itu, penyelarasan kebijakan ekonomi dengan strategi mitigasi perubahan iklim diharapkan mampu mendorong terciptanya pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di negara-negara berkembang, terutama negara-negara anggota D-8.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A. (2024). Investigating The Impact Of Digital Business Ecosystem In Enhancing Islamic Mobile Banking Adoption Through The Toe Framework. *Digital Business*, *4*(2), 100096. https://doi.org/10.1016/j.digbus.2024.100096

Alam, M. S., Raza, S. A., Shahbaz, M., & Abbas, Q. (2016). Accounting for Contribution of Trade Openness and Foreign Direct Investment in Life Expectancy: The Long-Run and Short-Run Analysis in Pakistan. *Social Indicators Research*, *129*(3), 1155–1170. https://doi.org/10.1007/s11205-015-1154-8

Ameen, A. A., & Ahmad, K. (2011). The Role of Finance Information Systems in A nti Financial Corruptions: A Theoretical Review. *2011 International Conference on Research and Innovation in Information Systems*, 1–6.

Asif, M., Khan, M. N., Tiwari, S., & Wani, S. K. (2023). *The Impact of Fintech and Digital Financial Services on Financial Inclusion in India*.

Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Baldwin, R. E. (1989). The Political Economy of Trade Policy. *Journal of Economic Perspectives*, *3*(4), 119–135.

Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. In *Xenobiotica* (Vol. 3). https://doi.org/10.3109/00498257509056115

Bank of Australia, R. (2019). *Economic Growth*. Reserve Bank Of Australia.

Bathelt, H., Buchholz, M., & Storper, M. (2024). The Nature, Causes, And Consequences Of Inter-Regional Inequality. *Journal of Economic Geography*, *24*(3), 353–374. https://doi.org/10.1093/jeg/lbae005

Bergh, A., & Nilsson, T. (2010). Good for Living? On the Relationship between Globalization and Life Expectancy. *World Development*, *38*(9), 1191–1203. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.02.020

Bodea, C., Houle, C., & Kim, H. (2021). Do financial crises increase income inequality? *World Development*, *147*. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105635

Bosworth, B. P., & Collins, S. M. (2003). The Empirics of Growth: An Update. *Brookings*

Papers on Economic Activity, *2003*(2), 113–179. http://www.jstor.org/stable/1209192

Bussmann, M. (2009). The Effect of Trade Openness on Women's Welfare and Work Life. *World Development*, *37*(6), 1027–1038. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.10.007

Canning, D., & Pedroni, P. (2004). The effect of infrastructure on long run economic growth. *Harvard University*, 1–30.

D-8 Organization for Economic Cooperation. (2021). *Declaration of The Eighth Summit of The Organization of Turkic States*. *November*.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017 Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. The World Bank.

Dhaniswara, K., & Harjono, S. H. (2021). *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (I. Jatmoko (ed.)). UKI Press.

Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Taylor & Francis. https://books.google.co.id/books?id=mqAvDwAAQBAJ

E. Warren, M. (2004). What Does Corruption Mean in a Democracy? *American Journal of Political Science*, *48*(2), 328–343.

Fakih, M. (1995). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. https://books.google.co.id/books?id=cbFOAAAAMAAJ

Freeman, T., Gesesew, H. A., Bambra, C., Giugliani, E. R. J., Popay, J., Sanders, D., Macinko, J., Musolino, C., & Baum, F. E. (2020). Why do some countries do better or worse in life expectancy relative to income? An analysis of Brazil, Ethiopia, and the United States of America. *International Journal for Equity in Health*, *19*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226286478

Global, S. (2022). *EViews ® 13 Beta Documentation*. 444. www.eviews.com

Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis*. Pearson Education, Limited. https://books.google.co.id/books?id=-WFPYgEACAAJ

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. In A. E. Hilbert (Ed.), *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (Fifth Edit). Douglas Reiner.

Hendershott, T., Michael, X., Zhao, J. L., & Eric, Z. (2021). *FinTech as a Game Changer : Overview of Research Frontiers FinTech as a Game Changer : Overview of Research Frontiers*. *December 2025*.

Hua, X., & Huang, Y. (2021). Understanding China's fintech sector: development, impacts and risks. *The European Journal of Finance*, *27*(4–5), 321–333. https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1811131

Imam, A. (2022). *Secretary General's Address at Foreign Council Meeting*. *May*, 1–11.

IPCC Panel. (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report*. 1–151.

Isabwa, H. K. (2021). Effect of Mobile Banking on Financial Inclusion Among Commercial Banks in Kenya. *International Journal of Business, Management & Economics*, *2*(3), 184–197.

Jhingan, M. L. (1997). *The Economics Of Development And Planning*. Nisha Enterprises.

Kanga, D., Oughton, C., Harris, L., & Murinde, V. (2022). The diffusion of fintech, financial inclusion and income per capita. *The European Journal of Finance*, *28*(1), 108–136. https://doi.org/10.1080/1351847X.2021.1945646

Kansil, C. S. T. (1978). *Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR 1978, serta dilengkapi dengan Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila*. Aksara Baru. https://books.google.co.id/books?id=-3paAAAAIAAJ

Kennedy, P. (2008). *A Guide to Econometrics*. Wiley. https://books.google.co.id/books?id=69MDEAAAQBAJ

Kenneth S Rogoff, C. M. (2012). *Mengapa Krisis Keuangan Kembali Terulang*. *38*(1), 195–219.

Kodoatie, R. J. (2005). Pengantar Manajemen Infrastruktur. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Kuncoro, M., Pembangunan, E., & Masalah, T. (2000). *Kebijakan ||*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth And Income Inequality. *The American Economic Review*, *XLV*.

Lane, J.-E. (2018). Philosophy of Science and Political Inquiry— Notes on Dowding,

Weber and Myrdal. *Open Journal of Philosophy*, *08*(03), 262–276. https://doi.org/10.4236/ojpp.2018.83019

Lenka, S. K., & Barik, R. (2018). *Has Expansion of Mobile Phone And Internet Use Spurred Financial Inclusion in the SAARC Countries?* https://doi.org/10.1186/s40854-018-0089-x

Lorber, J. (1994). *Paradoxes of Gender*. Yale University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1bhkntg

Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (Vol. 10). Worth Publishers.

Miladinov, G. (2020). Socioeconomic Development and Life Expectancy Relationship: Evidence From The EU Accession Candidate Countries. *Genus*, *76*(1). https://doi.org/10.1186/s41118-019-0071-0

Msomi, Thabiso Sthembiso Nzama, S. (2022). Financial literacy and SME loan repayments in South Africa during the COVID-19 era. *Investment Management and Financial Innovations*. https://doi.org/10.21511/imfi.19(4).2022.09

Muhammad Raihan Aulia Firdausi, & Rahmatina Awaliah Kasri. (2022). Islamic Financial Literacy Amongst Muslim Students in Indonesia: A Multidimensional Approach. *Al-Muzara'Ah*, *2022*, 77–94. https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94

NOAA, N. O. and A. A. (2007). *Climate Change: Basic Information*. U.S. Department of Commerce. https://www.noaa.gov/education/resource-collections/climate/climate-change-impacts

North, D. C. (1955). Location theory and regional economic growth. *Journal of Political Economy*, *63*(3), 243–258.

North, D. C. (1994). Economic Performance Through Time. *The American Economic Review*, *84*(3), 359–368. http://www.jstor.org/stable/2118057

Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. Maurice Temple Smith Limited. https://books.google.co.id/books?id=_TJHAAAAMAAJ

OECD. (2021). *Does Inequality Matter? How People Perceive Economic Disparities and Social Mobility: How People Perceive Economic Disparities and Social Mobility*. OECD Publishing. https://books.google.co.id/books?id=tXZPEAAAQBAJ

Olupona, T. (2023). The Impact of Education on Income Inequality. *Western Illinois*

University.

Omar, A., & Inaba, K. (2020). Does Financial Inclusion Reduce Poverty and Income Inequality in Developing Countries? *Journal of Economic Structures*. https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214-4

Owen, A. L., & Wu, S. (2007). Is Trade Good for Your Health? *Review of International Economics*, *15*(4), 660–682. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9396.2007.00677.x

Park, D., & Shin, K. (2015). Economic Growth, Financial Development, and Income Inequality. *ADB Economics Working Paper Series*, *441*.

Philp, M. (2009). Delimiting Democratic Accountability. *Political Studies*, *57*(1), 28–53.

R, S. H., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara K esatuan*. Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. https://books.google.co.id/books?id=jVeOAAAAMAAJ

Ramoglou, S., & Zyglidopoulos, S. C. (2015). The Constructivist View of Entrepreneurial Opportunities: a Critical Analysis. *Small Business Economics*, *44*(1), 71–78.

Rasyid, A. R., Alfareza, A. M. S., & M, M. A. (2024). *Peran Pendidikan dalam Pembangunan Manusia dan Berkelanjutan di Era Modern*. *8*(3), 57–65.

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. https://books.google.co.id/books?id=6ohGAAAACAAJ

Rizki Toli, M., Th Maramis, M. B., Masloman, I., Sam Ratulangi, U., & Abstrak, K. (2025). Analisis Inklusivitas Keuangan Pada Sektor Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2021q1-2023q4. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *2*, 41–42. https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklimHalaman:41-62

Rofiq, A. (2021). Pengaruh Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah: Studi Pada Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang Tahun 2020. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*. https://doi.org/10.2307/j.ctv14npk3p.9

Rogers, E. M. (1976). Communication and Development: The Passing of the Dominant Paradigm. *Communication Research*, *3*(2), 213–240.

https://doi.org/10.1177/009365027600300207

Salvatore, D. (2012). *International Economics, 11th Edition*. John Wiley & Sons. https://books.google.co.id/books?id=_UEcAAAAQBAJ

Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2009). *Economics*. McGraw-Hill Education. https://books.google.co.id/books?id=rMovEAAAQBAJ

Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector*. W. W. Norton. https://books.google.co.id/books?id=dWe1QgAACAAJ

Stiglitz, J. E. (2019). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent.* . https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=70WFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=Stiglitz,+Joseph+E.+People,+Power,+and+Profits:+Progressive+Capitalism+for+an+Age+of+Discontent.+W.W.+Norton+%26+Company&ots=fX51pr8RJk&sig=z29A1WmBgv_GGkmJoe9HghWGmik

Stone, D. C. (1974). *Professional Education in Public Works: Environmental Engineering and Administration. A Handbook for Establishing University Centers and Programs*. ERIC Clearinghouse.

Subirats, J. (2001). Public policy analysis. *Gaceta Sanitaria / S.E.S.P.A.S*, *15*(3), 259–264. https://doi.org/10.1016/s0213-9111(01)71557-9

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Gramedia Widiasarana Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=kWGVXrjpcjQC

Todaro, M. P. ., & Smith, S. C. . (2020). *Economic development*. Pearson.

Tohirin, A., & Husaini, F. (2019). *Does Islamic Banking Financing Help the Poor?* 41–50.

Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. South-Western Cengage Learning. https://books.google.co.id/books?id=4TZnpwAACAAJ